

TINJAUAN SECARA KOMPREHENSIF PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (KONSEP DAN PERMASALAHANNYA)

Oleh :
Soeyitno Soedirman

*Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (UNMUL)
Samarinda*

Pendahuluan

Sejak awal pemanfaatan sumberdaya hutan alam produksi dengan menerapkan sistem manajemen silvikultur TPTI, ingin diwujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*), karena hal ini merupakan amanah bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 33, UUD 1945, yang secara khusus dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun 1967 (Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kehutanan). Secara operasional komitmen tersebut diwujudkan dalam dokumen penting pengelolaan hutan alam berupa *Forestry Agreement (FA)* dan Surat Keputusan Pengusahaan Hutan.

Bersamaan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, muncul isu-isu global tentang dampak dari pemanfaatan sumberdaya hutan yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia.

Dengan munculnya isu-isu global tersebut, pemanfaatan hutan alam tropis di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok, yaitu masalah-masalah internal (sistem pengelolaan, pembangunan nasional dan daerah, sumberdaya manusia) dan masalah-masalah eksternal (perkembangan IPTEK dan persaingan dalam perdagangan bebas).

Prinsip Kelestarian dan Pengusahaan Hutan Alam Produksi

Pengertian dan perkembangannya

Kata lestari (*sustain*) seringkali dipergunakan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam (*natural resources*). Dalam bidang kehutanan kelestarian mempunyai pengertian yang universal dan telah diterapkan lebih dari satu abad yang lalu pada saat manusia mulai memanfaatkan sumberdaya hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan (ilmiah) dan modern. Dalam perkembangannya, implementasi dari prinsip tersebut dipengaruhi dan tergantung pada tingkat kemampuan dan kebutuhan manusia pada suatu saat.

Konsep manajemen hutan lestari (*sustainable management*) pada awalnya dikembangkan dalam pengelolaan hutan di daerah iklim sedang (*temperate forest*), yaitu di Jerman, sebagai dasar dalam pengaturan hasil (*yield regulation*), dengan harapan diperoleh hasil yang berkesinambungan (lestari).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, berakibat pula meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai produk, termasuk produk hasil hutan. Intensifikasi pemanfaatan sumberdaya hutan merupakan konsekuensi yang timbul kemudian. Hal ini didorong oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kehutanan. Akibat dari perkembangan-perkembangan tersebut, dimensi kelestarian tidak hanya terbatas pada kelestarian hasil, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.

Berkaitan dengan manajemen hutan secara lestari tersebut, ITTO lewat expert panelnya memberikan pengertian dan lingkup *sustainable tropical forest management* sebagai berikut :

- a. Kelangsungan produksi kayu dan non kayu serta manfaat lainnya.
- b. Penataan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan aspek keragaman hayati.
- c. Stabilitas ekosistem dan produktivitas hutan.
- d. Dampak positif terhadap areal di luar hutan.
- e. Konsultasi dengan masyarakat hutan.

Berdasarkan lingkup tersebut di atas, pengelolaan hutan secara lestari adalah : *"Proses pengelolaan areal hutan permanen untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah ditentukan dengan berdasarkan kontinuitas produksi dan manfaat lain yang diinginkan, tanpa mengakibatkan kemunduran nilai produktivitas hutan di masa datang dan timbulnya akibat yang diharapkan pada komponen fisik dan lingkungan sosialnya"*.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengelolaan hutan secara lestari tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Kebijakan dan komitmen nasional serta kebijakan ekonomi nasional.
- b. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
- c. Tersedia struktur pemerintahan yang dapat menjamin bagi pelaksanaan kebijaksanaan dan komitmen tersebut di atas.
- d. Tersedianya kapasitas yang cukup, dalam bentuk: jumlah sumberdaya manusia yang berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi.
- e. Investasi yang cukup dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya hutan.

Pengelolaan hutan alam produksi dan implementasi azas kelestarian

Pemanfaatan sumberdaya hutan alam produksi di luar Jawa yang dimulai sejak tahun 1970-an, telah menempatkan sektor kehutanan menjadi

primadona dalam perolehan devisa negara pada non migas. Sebagaimana dikemukakan bahwa sejak awal pelaksanaannya pemanfaatan sumberdaya hutan alam produksi di laur Jawa tersebut telah mendasarkan pada azas kelestarian. Hal ini terbukti adanya kewajiban para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk :

- a. Menyusun Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH, RKL dan RKT) sebagaimana tercantum pada Bab II, Pasal 3, ayat (3) dari PP No. 21 tahun 1970.
- b. Melaksanakan penebangan secara Tebang Pilih atas dasar kelestarian dan wajib mengadakan permudaan (alami atau buatan), sebagaimana tercantum dalam Bab III, Pasal 8, ayat (1) dari PP yang sama.

Secara operasional kewajiban-kewajiban tersebut dirumuskan dalam Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), sebagai sistem manajemen silvikultur pengelolaan hutan alam produksi.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa prinsip kelestarian yang mencakup berbagai aspek sebagaimana dirumuskan oleh ITTO (1992) telah menjadi komitmen dalam pembangunan kehutanan di Indonesia. Namun dalam perjalanan implementasinya belum secara simultan dilaksanakan, khususnya dalam kegiatan lapangan. Dari sejarah pengelolaan hutan alam produksi di luar Jawa, pelaksanaan prinsip kelestarian tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Sebagai gambaran tentang tahapan dalam mewujudkan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan alam produksi, tercermin dari muatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tahunan (RKT) dalam kurun waktu 1970-an sampai dengan 1990-an, sebagaimana tertera pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Rangkuman Muatan RKT pada Periode yang Berbeda

Periode	Muatan secara garis besar
1970-an	I. Data Pokok (sumberdaya, investasi, kegiatan produksi) II. Rencana (sumberdaya, investasi, produksi, pemasaran, industri) III. Lain-lain (penelitian dan pengembangan)
1980-an	I. Data Pokok (lebih terinci dari tahun 1970-an) II. Rencana (lebih rinci dari tahun 1970-an, ditambah dengan AMDAL) III. Lain-lain (penelitian dan pengembangan)
1990-an	I. Data Pokok (sama dengan tahun 1980-an) II. Realisasi RKT tahun lalu (lebih rinci, tahapan TPTI, AMDAL HPH dan pelaksanaan program HPH BINA DESA). III. Rencana kegiatan tahun RKT berjalan dan lampiran-lampirannya

Sumber : RKT PT. Troyana, Kalimantan Timur

Dari rangkuman tersebut di atas, jelas bahwa terdapat kecenderungan yang semakin meningkat dari muatan Rencana Karya tersebut. Hal ini berarti bahwa kegiatan pengusahaan hutan alam produksi di Indonesia telah menuju ke arah mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari (*sustainable tropical forest management*) sebagaimana disyaratkan oleh ITTO (1992). Kecenderungan tahapan pencapaian untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari tersebut, secara fisik terbukti pula bahwa pencapaian target fisik kegiatan juga belum memuaskan. Sebagai contoh, sampai dengan akhir Pelita V pencapaian pengukuhan batas areal HPH baru mencapai 32,08% (112.918 km), sedangkan pelaksanaan penanaman pengayaan (*enrichment planting*) dari realisasi tebangan seluas 83.411 ha dalam Pelita IV, baru sekitar 1.195 ha yang berhasil diperkayakan.

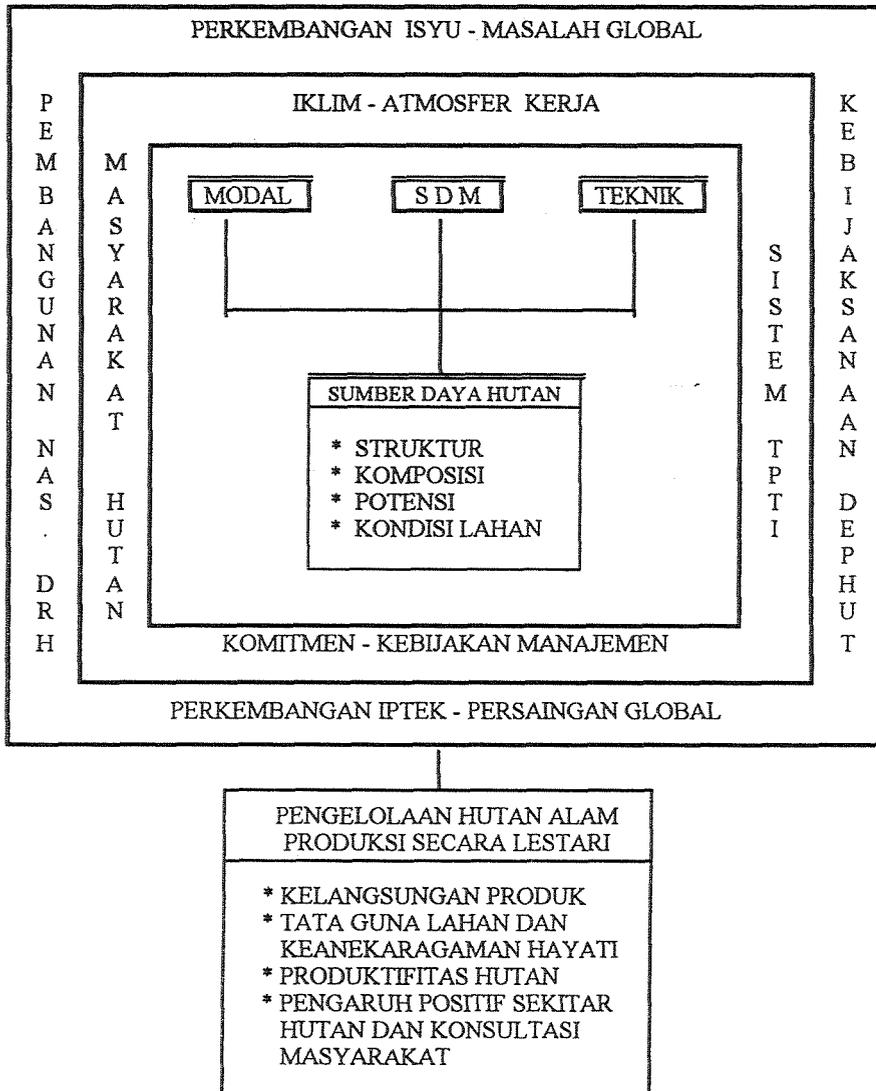
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari : Komponen, Peranan dan Keterkaitannya

Komponen dalam pengelolaan hutan alam produksi lestari

Pada dasarnya terdapat dua komponen pokok yang terkait di dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari, yaitu :

1. Komponen internal HPH, yang terdiri dari :
 - a. Kemampuan manajemen, yang meliputi :
 - Modal
 - Sumberdaya manusia
 - Kemampuan teknik (profesionalisme)
 - b. Sumberdaya hutan
 - c. Komitmen atau kebijakan manajemen

2. Komponen eksternal, yang terdiri dari :
 - a. Level Nasional, meliputi :
 - Sistem manajemen pengelolaan hutan (sistem TPTI)
 - Masyarakat hutan
 - Kebijakan Departemen Kehutanan
 - Program pembangunan nasional dan daerah
 - b. Level Global-Internasional, meliputi :
 - Perkembangan - isu global
 - Perkembangan IPTEK
 - Persaingan global



Gambar 1. Komponen dalam Pengelolaan SDH Secara Lestari

Dari gambar tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari merupakan sistem yang sangat kompleks.

Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan alam produksi lestari

Dari Gambar 1 terlihat bahwa sistem pengelolaan sumberdaya hutan alam produksi terdiri dari tiga sub sistem yang berkaitan satu sama lain, yaitu :

1. Sub sistem kegiatan pengelolaan hutan
2. Sub sistem infrastruktur mikro
3. Sub sistem infrastruktur makro

1. Subsistem kegiatan pengelolaan hutan

- a. Terdiri dari komponen : modal, sumberdaya manusia (jumlah dan kualitas) dan teknik.
- b. Kondisinya beragam dari satu unit pengelolaan ke unit pengelolaan yang lain.
- c. Komponen sumberdaya manusia merupakan komponen sistem yang perlu perhatian khusus dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan.
- d. Dengan SDM yang cukup (berdasarkan standar) dan berkualitas dan profesional, maka pemanfaatan komponen sumberdaya hutan dengan menggunakan modal dan teknik akan menciptakan kondisi internal yang mantap.
- e. Terdapat kecenderungan meningkatkan pemanfaatan SDM yang berkualitas (*profesional forester*) dalam pengelolaan SDH. Sementara di sektor pemerintah, terutama di daerah masih belum memadai (*Tabel 2*)
- f. Kondisi sumberdaya hutan yang beragam (struktur, komposisi dan potensi) sebagai komponen sub sistem kegiatan pengelolaan SDH akan mempengaruhi kinerja HPH bersangkutan.

2. Sub sistem infrastruktur mikro

- a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang memberikan prakondisi bagi berlangsungnya sub sistem kegiatan pengelolaan.
- b. Khususnya komponen komitmen dan kebijaksanaan manajemen akan menciptakan dan mempengaruhi iklim atau atmosfer kerja dalam sub sistem kegiatan pengelolaan.
- c. Oleh karenanya kedua komponen harus mampu menjadi motor penggerak bagi kelancaran sub sistem pelaksanaan kegiatan.
- d. Sub sistem kegiatan pengelolaan harus mendasarkan kegiatannya pada komponen Sistem TPTI (sebagai pedoman utama yang harus dirujuk). Proses pengembangan sistem manajemen silvikultur ini akan mempengaruhi kemandapan sub sistem pelaksanaan kegiatan pengelolaan tersebut.
- e. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan dipengaruhi pula oleh komponen infrastruktur mikro yang lain yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain, juga adanya sifat yang dinamis.
- f. Kehamonisan antara komponen infrastruktur ini dengan sub sistem pelaksanaan kegiatan pengelolaan menjadi salah satu faktor bagi tercapainya *sustainable forest management*.

3. Sub sistem infrastruktur makro

- a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumberdaya hutan alam produksi, berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah dan perkembangan global.
- b. Koordinasi antara pembangunan kehutanan dengan pembangunan sektor yang lain merupakan faktor penting bagi tercapainya pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
- c. Komoditi hasil hutan (kayu dan non kayu) merupakan salah satu andalan (primadona) ekspor non migas Indonesia, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan persaingan dalam pasar internasional (persaingan bebas) menjadi faktor penting bagi pengusaha hutan yang berkesinambungan.
- d. Perkembangan IPTEK merupakan peluang dan tantangan bagi peningkatan kualitas pengusaha hutan berkelanjutan sehingga siap untuk masuk pasar bebas tahun 2020.

Strategi dalam Upaya Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Alam Produksi Lestari

- a. Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa HPH di berbagai daerah di Indonesia, dapat diduga bahwa komponen internal berupa komitmen dan kebijaksanaan tingkat manajemen HPH memberi warna pada kinerjanya. Oleh karenanya masalahnya adalah bagaimana komponen sistem pengelolaan hutan alam produksi secara lestari ini dapat didorong oleh Pemerintah.
 1. Sumberdaya manusia (jumlah dan kualitas serta pembinaan profesionalismenya).
 2. Investasi berupa IPTEK bagi peningkatan kualitas perencanaan.
 3. Selanjutnya investasi tersebut dapat pula meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan.
 4. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan dibantu oleh investasi IPTEK, tidak saja dapat meningkatkan efisiensi kinerja, tetapi dapat pula pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas sumberdaya hutan (melalui rekayasa teknik silvikultur).
- b. Sistem TPTI sebagai instrumen pengelolaan hutan lestari. Pengkajian secara berkelanjutan terhadap sistem ini, khususnya untuk tipe-tipe hutan non Dipterocarp yang juga potensial di beberapa daerah di Indonesia.
- c. Pendekatan sosial ekonomi terhadap masyarakat hutan perlu ditingkatkan dengan koordinasi dengan sektor dan lembaga lain. Perlu disadari bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu hal yang sangat kompleks (perlu pendekatan multidisiplin dan multi sektor). Peranan Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan perlu ditingkatkan.
- d. Kebijakan Departemen Kehutanan sebagai infrastruktur bagi pengusaha hutan alam produksi secara lestari harus mampu berfungsi tidak saja

sebagai rujukan dan pengendalian bagi pelaksanaan operasional HPH, tetapi dapat pula berfungsi sebagai pendorong dan motivator bagi meningkatnya profesionalisme HPH.

- e. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kehutanan perlu ditingkatkan, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat hutan, terlebih bagi koordinasi penggunaan lahan hutan (tata ruang dan status lahan = *property right*). Hanya dengan status kepastian lahan hutanlah, pengelolaan sumberdaya hutan alam produksi secara lestari dapat dijamin.
- f. Penguasaan IPTEK di bidang kehutanan oleh seluruh rimbawan perlu terus diupayakan untuk meningkatkan taraf profesionalisme sumberdaya manusia dan sekaligus kualitas sumberdaya hutan. Dengan penguasaan IPTEK kemampuan bersaing dalam memasuki era perdagangan bebas dapat ditingkatkan. Sehingga peranan pembangunan kehutanan Indonesia dalam menjawab masalah-masalah global dapat ditingkatkan.

Tabel 2. Rataan Jumlah Pegawai dalam Lingkup Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan Tenaga Kerja di Unit Logging HPH

Tahun/ Pelita	Status Kepegawaian			Tenaga Kerja di HPH	Keterangan
	Pusat	Daerah	Jumlah		
I	211	346	557	5.861 (2.239)	* dari jumlah pegawai tersebut \pm 75% merupakan tenaga teknis. * tenaga kerja di HPH, merupakan tenaga di unit logging.
II	346	494	840	19.289 (2.777)	
III	358	518	876	13.983 (688)	
IV	412	683	1.095	12.090 (179)	
V	294	750	1.044	15.364 (106)	